

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepemimpinan *Datuak* dalam sistem adat Minangkabau, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu Balanti, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Kepemimpinan *Datuak* berperan penting sebagai pemimpin adat yang menjaga tatanan sosial, menyelesaikan perselisihan, dan melestarikan adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran *Datuak* dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako serta menganalisis pergeseran fungsi kepemimpinannya akibat pengaruh modernisasi dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Datuak* masih diakui sebagai tokoh adat, perannya dalam penyelesaian konflik sosial mulai terpinggirkan oleh dominasi hukum negara. Penyelesaian konflik tanah pusako dilaksanakan melalui tingkatan musyawarah adat, mulai dari tingkat pusako, suku, kaum hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun, tantangan muncul ketika keputusan adat berbenturan dengan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi peran *Datuak* agar tetap relevan dan mampu menjawab dinamika sosial di masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Kepemimpinan *Datuak*, Adat Minangkabau, Konflik Sosial, Tanah Pusako, Nagari Sikabu Balanti

ABSTRACT

This study discusses the leadership of *Datuak* within the Minangkabau customary system, particularly in the context of resolving social conflicts related to *tanah pusako* (ancestral land) in Nagari Sikabu Balanti, Lubuk Alung Subdistrict, Padang Pariaman Regency. The leadership of *Datuak* plays a crucial role as a traditional leader who maintains social order, mediates disputes, and preserves Minangkabau customs. This research aims to describe the role of *Datuak* in resolving social conflicts over *tanah pusako* and to analyze the shifting functions of this leadership due to the influence of modernization and state law. This study uses a qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that although *Datuak* is still recognized as a customary figure, their role in conflict resolution has been increasingly marginalized by the dominance of national law. Conflict resolution processes are conducted through customary deliberation levels, from the *pusako* level, clan (*suku*), lineage group (*kaum*), up to the Nagari Customary Council (*KAN*). However, challenges arise when customary decisions conflict with statutory law. Therefore, revitalizing the role of *Datuak* is necessary to maintain its relevance and to address the dynamics of Minangkabau society.

Keywords: *Datuak* Leadership, Minangkabau Customary Law, Social Conflict, *Tanah Pusako*, Nagari Sikabu Balanti